

## **STUDENT EXCHANGE KE LUAR NEGERI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KOMPETENSI LULUSAN**

**Yuswati**

[yuswati@uny.ac.id](mailto:yuswati@uny.ac.id),  
PTBB FT UNY

### **ABSTRAK**

*Student exchange* luar negeri diperlukan adanya komitmen serius untuk pengembangan pembelajaran, serta mendorong pendekatan strategisnya; mendapatkan kepuasan kerja yang cukup dan memiliki kemampuan dan keterampilan secara koheren; mahasiswa dapat mendapatkan pembelajarannya dari benar-benar ahli di bidangnya. Bebas Visa, visa turis, kurikulum, fleksibilitas waktu pelaksanaan, tata aturan ketenagaan negara setempat, kesiapan finansial dan mental, merupakan peluang dan tantangan yang harus dipersiapkan. Manfaat positif *student exchange* untuk peningkatan soft skill, srawung internasional, mandiri, *self confidence*, kerjasama tim, komunikasi, pelaksanaan kurikulum melalui Work Base Learning. Ketidak sinkronan antara permintaan waktu magang dari pihak industri dengan kesiapan lembaga pendidikan terkait kalender akademik pelaksanaan magang, adalah kendala paling besar. Antusias mahasiswa *student exchange* ke luar negeri, adalah kekuatan dan peluang mendorong terlaksananya *export apprenticeship* ini. Perlu dukungan pemerintah Indonesia untuk mengaktifkan SK bersama 3 Kementrian, yaitu Kementrian Pendidikan, kementrian Industri dan kementrian Ketenaga Kerjaan terkait magang industri, serta dibentuknya forum kerjasama magang luar negeri disemua perguruan tinggi vokasional sejenis se Indonesia, dengan target 7 tahap: dapatkan industri yang memiliki visi dan tujuan yang sama; kepemimpinan; kreatif dalam keuangan dan penggalangan dana; hitam diatas putih tujuan magang, harapan dan komitmennya; monitoring dan terjalin komunikasi, karena kontrak tidak menjamin keterlaksanaan program yang baik; buatlah komitmen kerjasama jangka panjang; dan sabar, "keterampilan tidak akan terjadi semalam".

**Kata kunci:** *student exchange*

## PENDAHULUAN

Spektrum Tenaga Kerja di Indonesia, menurut data BPStahun 2016, jumlah penduduk 9,79% lulusan pendidikan tinggi, dan dapat dimaknai banyak pengangguran dari lulusan Perguruan Tinggi. Pemerintah mempunyai pekerjaan yang sangat besar mengingat tingginya kebutuhan tenaga kerja terampil dan inovatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemberlakuan ASEAN Economic Community atau komunitas ekonomi ASEAN pada tahun 2015, kawasan ASEAN menjadi pasar terbuka yang berbasis produksi, sehingga aliran barang, jasa, dan investasi akan bergerak bebas, sesuai dengan kesepakatan ASEAN. Peran Indonesia di ASEAN sebagai "pasar terbesar dan basis produksi" paling potensial untuk dikembangkan baik dari faktor sumber daya alam maupun demografi. Kelas menengah yang tumbuh kuat dan kebutuhan akan penguasaan teknologi, menyebabkan Indonesia akan dibanjiri berbagai produk, inovasi, bahkan tenaga kerja asing yang tentunya akan memperketat tingkat persaingan dengan tenaga kerja, inovasi, dan produk dalam negeri. Hal ini memungkinkan meningkatnya angka pengangguran di Indonesia (Kemendikbud, 2015).

Sebagai salah satu prioritas dalam *mutual recognition arrangements* (MRA) antara negara ASEAN pada MEA 2015 sektor pariwisata di Indonesia dinyatakan yang paling siap dibandingkan profesi lainnya sesuai kesepakatan MRA yaitu akuntansi, teknik, survei, arsitektur, keperawatan, kesehatan, perawatan gigi dan pariwisata, namun sektor pariwisata merupakan sumber daya yang paling siap menghadapi persaingan bebas dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, akan tetapi fakta di lapangan mengatakan banyak kekurangan dan fakta yang mengungkapkan bahwa sektor pariwisata di Indonesia masih harus berbenah. <http://www.kompasiana.com>.

Salah satu tantangan yang dihadapi pendidikan kontemporer bertaraf internasional adalah untuk memastikan bahwa siswa atau mahasiswa diberi kesempatan untuk membuat pilihan informasi tentang masa depan karier dan untuk memperoleh kapasitas untuk transisi ke karir ini. Lembaga pendidikan perlu mengelola kurikulum mereka, kapasitas guru, jadwal, dan keragaman populasi siswa dengan menawarkan upaya yang menarik dan bermakna bagi kehidupan di luar sekolah atau kampus. Salah satu usaha untuk mengatasi masalah ini adalah melalui pembentukan kemitraan *schoolindustry* kemitraan. Sehingga terjadi proses transfer

pengetahuan antara industri dan sekolah di kemitraan ini, dan kemitraan industri merupakan transisi dari sekolah ke dunia kerja (Watters, Hay, Dempster, & Pillay, 2013).

KBRI, Kuala Lumpur: Kerjasama Pendidikan Indonesia-Malaysia saat ini tercatat 1200 siswa SMK dari 75 SMK yang ada di Indonesia melakukan praktek kerja industri di 50 perusahaan Malaysia. "Hal ini merupakan kelebihan tersendiri bagi siswa siswa SMK tersebut karena setelah tamat sekolah, dengan pengalaman prakerin di Malaysia, siswa siswi tersebut mempunyai kemudahan melamar kerja baik di Malaysia maupun di negara-negara ASEAN lainnya," kata Atase Pendidikan KBRI Kuala Lumpur Prof Rusdi di Kuala Lumpur, Sabtu (14/06/2014) (Besty Charmin, 2014). Bagaimana peluang Pendidikan Vokasi di Perguruan Tinggi untuk melaksanakan praktek industri/ student exchange diluar negeri?

Mempersiapkan mahasiswa *student exchange* secara akademis menghadapi kendala yang cukup banyak, selain masalah administrasi, maka persyaratan *hardskill*, *soft skill*, bahasa Inggris, kesiapan mendapatkan materi tambahan, mempersiapkan mata kuliah yang akan kosong selama *Student Exchange*, diperlukan manajemen yang terprogram dengan baik. Program student exchange luar negeri dengan mendapatkan sertifikat kompetensi dari Amerika tentu saja menguntungkan bagi siswa untuk mendapatkan pekerjaan kelak dan memiliki *bargaining position*. Terlebih dengan diberlakukannya MEA/ Masyarakat Ekonomi Asia pada Desember 2015 ini.

Bebas Visa untuk beberapa negara ASEAN, dapat sebagai kekuatan dan peluang melaksanakan program *exportapprenticeships*. Karenatanpa pengurusan Visa, mahasiswa dapat melaksanakan magang selama 4 minggu dengan pasport sebagai turis. Salah satu program yang dapat dilakukan adalah melalui *student exchange* ke negara tetangga bebas visa. Sebagai *student exchange*, mahasiswa secara legal dilindungi undang-undang sebagai mahasiswa magang dan bukan sebagai tenaga kerja.

## **PEMBAHASAN**

*Student exchange* adalah pertukaran mahasiswa keluar negeri untuk praktek kerja atau *apprenticeships*. Prinsip paling mendasar adalah kerjasama sesama lembaga pendidikan yang sekaligus dapat melaksanakan kegiatan magang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh lembaga pendidikan di kedua belah pihak, dan dapat melaksanakan praktek magang relevan dengan kompetensi yang diharapkan. Bagaimana prasyarat

lembaga pendidikan yang layak dipilih untuk bekerjasama adalah Lembaga pendidikan yang melaksanakan kurikulumnya berdasar prinsip *Work Base Learning* secara murni, dimana sebagian pendidikan dilakukan di kelas dan bagian lainnya dilaksanakan di dunia kerja. Secara otomatis lembaga pendidikan tersebut harus memiliki industri atau dunia kerja terkait. Atau setidaknya memiliki mitra bisnis yang bersedia melaksanakan kurikulum pembelajaran khususnya praktik, dengan kata lain pelaksanaan kurikulum secara *Link and Match*. Bila kedua kondisi tersebut diatas tidak memungkinkan dimiliki oleh suatu lembaga pendidikan, maka masih ada peluang lain yaitu melalui *export apprenticeships* atau praktek industri luar negeri. Mengapa pendidikan vokasi sangat memerlukan program *apprenticeships*?

*All apprenticeships are workplace learning – but not all forms of workplace learning are apprenticeships!* (Alessandra Molz, 2015). Artinya bahwa pelatihan kerja dalam bentuk magang di industri/ praktek industri/ *student exchange* harus dirancang dengan baik, agar memperoleh hasil sebagaimana diharapkan di kedua belah pihak, yaitu institusi pendidikan dan dunia usaha atau dunia kerja.

*The key principle of apprenticeships and traineeships is that of learning and developing skills through a combination of hands on experience and formal training. The primary responsibility for providing apprentices and trainees with relevant instruction and practical experience rests with the employer. This is supplemented by formal training delivered by a Registered Training Organisation (RTO). Apprentices and trainees who successfully complete their formal training will receive a nationally recognised qualification from their training organisation.*

Prinsip utama dari magang dan pelatihan kerja adalah bahwa pembelajaran dan mengembangkan keterampilan melalui kombinasi pengalaman dan pelatihan formal. Tanggung jawab utama untuk menyediakan magang dan pelatihan dengan instruksi yang relevan dan pengalaman praktis berada di tangan industri. Hal ini dilengkapi dengan pelatihan formal disampaikan oleh *Registered Training Organisation* (RTO). Magang dan *trainee* yang berhasil menyelesaikan pelatihan formal mereka dan menerima kualifikasi yang diakui secara nasional atau internasional dari organisasi pelatihan mereka.

Magang dinegara maju seperti New South Wales, kegiatan magang dikelola secara terprogram dan diatur regulasinya oleh *NSW Department of Education and Communities (NSW DEC)*. Hal ini sangat penting bahwa pekerja, magang dan *trainee* membaca

dan mempelajari panduan ini secara seksama, termasuk memahami peran, tata aturan dan tanggungjawab yang ada dikontrak magang, diantaranya: (a) *how to establish an apprenticeship or traineeship*; (b) *national training contracts and registration with State Training Services*, (c) *obligations of employers, apprentices and trainees*; (d) *financial assistance*; (e) *the roles of Australian Apprenticeships Centres (AACs), registered training organisations (RTOs) and group training organisations (GTOs) support provided by State Training Services*.

Artinya, dalam program magang di Australia sudah mapan, dimana setiap kegiatan magang wajib memenuhi ketentuan berikut: (a) bagaimana program magang cukup stabil institusinya; (b) adanya kontrak pelatihan nasional dan pendaftaran dengan Layanan Pelatihan Negara; (c) kewajiban pengusaha, magang dan pelatihan; (d) layanan Keuangan; e) peran institusi magang baik ditingkat pusat maupun ditingkat (AAC), organisasi yang terdaftar pelatihan (RTO) dan organisasi pelatihan kelompok (GTO) atas dukungan yang diberikan oleh Jasa Pelatihan Negara.

Secara umum, ada 3 hal yang harus ada dalam kegiatan magang ini adalah: (a) kontrak magang/ training; b) upah atau gaji; dan (c) perencanaan kegiatan. Kontrak magang/ pelatihan yang ditandatangani oleh kedua pimpinan (Sekolah dan Dunia Usaha), dan magang atau pelatihan yang disetujui oleh Jasa Pelatihan Negara. Magang/ pelatihan harus mendapatkan upah atau dibayar sesuai pengaturan industri yang sesuai (misalnya: perjanjian penghargaan atau perusahaan).

Rencana pelatihan didukung oleh RTO yang menentukan pelatihan yang dibutuhkan untuk mencapai kualifikasi yang diakui secara nasional atau internasional, bila (a) *a training contract that is signed by both the employer and apprentice or trainee and approved by State Training Services*; (b) *paid employment under an appropriate industrial arrangement (for example, an award or enterprise agreement)*; (c) *a training plan endorsed by an RTO that specifies the training required to achieve the appropriate nationally recognised qualification*.

Di samping hal tersebut di atas, menurut Cunningham (2004), ada beberapa aspek manfaat atau keuntungan dari program magang ini, diantaranya adalah (a) adanya komitmen serius tentang keutuhan pembelajaran, yang mendorong pendekatan strategis; (b) mendapatkan kepuasan kerja yang cukup dari menguasai secara koheren dari kemampuan dan

keterampilan; (c) manfaat bagi masyarakat adalah memiliki orang yang benar-benar ahli di bidangnya.

Selanjutnya dikatakan bahwa magang juga memiliki keterbatasan yaitu: (a) membutuhkan banyak waktu dan belum tentu menjamin tercapainya kualitas skill yang diharapkan; (b) magang membutuhkan dukungan mentor dan sumberdaya yang besar; (c) bila skema magang tidak dirancang dengan baik, maka magang akan memberikan kebiasaan yang buruk.

*Possible benefits apprenticeship is (a) about making a serious commitment to a body of learning, it encourages a strategic approach, (b) People gain considerable job satisfaction from mastering a coherent body of capabilities and skills, (c) Society benefits from having people who are real experts in their field, the concern about the poor working practices of 'cowboy' plumbers and builders is evidence of the societal need for people who have gone through a rigorous apprenticeship.* (Cunningham, Dawes, & Bennett, 2004). Pendapat Cunningham diatas menunjukkan manfaat magang/ praktek industri/ *student exchange* adalah (a) adanya komitmen serius untuk pengembangan pembelajaran, serta mendorong pendekatan strategisnya, (b) orang mendapatkan kepuasan kerja yang cukup dan memiliki kemampuan dan keterampilan secara koheren, (c) masyarakat dapat memanfaatkan pembelajarannya dari benar-benar ahli di bidangnya.

Pendapat senada tentang keunggulan *student exchange/* praktek industri/ magang sangat berperan vital dalam: (a) *smoothing school-to-work transitions by providing relevant work experience in a real labour-market environment while learning a trade; equipping youth with the skills needed by companies; (b) being an effective training methodology for transferring complex skillsets, including for high-technology occupations; (c) combining work and training opportunities, linked with a salary or allowance; (d) enabling companies to better cater for immediate and future staff needs; (d) making TVET systems more responsive to skills shortages and skills mismatch* (Alessandra Molz, 2015).

Pendapat Alessandra di atas menyatakan bahwa: (a) transisi dari sekolah ke dunia kerja atau industri dapat dijumpatani melalui program magang yang relevan dengan lingkungan pasar tenaga kerja yang nyata; (b) melengkapi pemuda dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan; (c) menjadi metodologi pelatihan yang efektif untuk mentransfer *skillsets* yang kompleks, termasuk untuk pekerjaan teknologi tinggi; (d) menggabungkan pekerjaan dan kesempatan

pelatihan, terkait dengan gaji atau tunjangan; (e) memungkinkan perusahaan untuk lebih memenuhi kebutuhan staf langsung dan masa depan; (f) membuat sistem TVET lebih responsif terhadap kekurangan atau ketidakcocokan keterampilan.

Isu strategis terkait kegiatan student exchange/ magang/ praktek industri, sebagai isu kebijakan VET (Vocational Education Training) tingkat nasional adalah: (a) Apa misi lembaga pendidikan kejuruan dan pelatihan adalah hak warga negara untuk pelayanan publik bagi VET? (b) Apa tanggungjawab pemerintah dan mitra sosial (dudi) terhadap program VET?; (c) Apakah distribusi pelayanan publik pelatihan memiliki kelayakan?; (c) Bagaimana skala prioritas secara nasional untuk penyediaan pelatihan (termasuk kelompok sasaran) dan sistem pengembangannya; (d) Bagaimana prinsip-prinsip pembelajaran di lembaga pendidikan dan pembelajaran dipelatihan/ dudi?; (e) Bagaimana jenis penyediaan dan status instruktur dudi; (f) Bagaimana standar keterampilan dan kualifikasi kejuruan; (g) Bagaimana kurikulum nasional untuk lembaga-lembaga pelatihan dan kurikulum kejuruan untuk pendidikan umum/ non-formal; (h) Bagaimana sistem penilaian dan sertifikasi keterampilan; dan buku-buku pelajaran nasional? (Gasskov, 2000).

Ada 7 langkah yang harus dilakukan untuk suksesnya program magang adalah berikut: (a) *Find Partners with a Shared Vision and Goals*; (b) *Remember that Leadership Matters*; (c) *Get Creative with Money and Donations*; (d) *Get It in Writing*; (e) *Establish Ongoing Supervision and Communication*; (f) *Make a Commitment for the Long Haul*. (g) *Be Patient -- It Doesn't Happen Overnight*. (Kathy Baron, 2015).

Bila mahasiswa melaksanakan student exchange/ praktek industri di lembaga yang mapan sebagaimana dicontohkan di New South Wales, atau magang di hotel-hotel berbintang dan bertaraf internasional untuk bidang Boga dan Salon-Spa atau bidang vokasi lainnya, maka harapannya mahasiswa magang akan mendapatkan kompetensi sesuai dengan tuntutan dunia kerja yang bertaraf internasional pula.

*Collaborations with industries and professionals are a core component of career technical education. Done well, they can be a winning experience for everyone.* Jadi ada 7 tahap yang harus dilalui dalam melaksanakan magang yang baik menurut Kathy Baron, yaitu: (a) dapatkan industri yang memiliki visi dan tujuan yang sama; (b) kepemimpinan; (c) kreatif dalam keuangan dan penggalangan dana; (d) hitam diatas putih atau kontrak tentang tujuan magang, harapan dan komitmennya; (e) monitoring dan

terjalin komunikasi, karena kontrak tidak menjamin keterlaksanaan program yang baik; (f) buatlah komitmen kerjasama jangka panjang; (g) sabar, "keterampilan tidak akan terjadi semalam".

Tujuh hal penting dalam kegiatan *student exchange/* magang atau Praktek Industri dikemukakan juga oleh (David H. Hoover<sup>1</sup>, 2012) terdiri dari: (a) *mentor > team > business Owner*, (b) *sustainable ratio*; (c) *culture over curriculum*, (d) *in the trenches*, (e) *pet project*; (f) *milestones*; (g) *feedback loops*. Selanjutnya dijelaskan bahwa mentor memegang peranan penting dalam program magang, dimana mentor yang baik adalah (1) mentor yang sangat tertarik untuk bekerja dengan pemula; tim yang bersedia untuk bergabung dengan pekerja pemula dan pemilik usaha yang bersedia untuk memungkinkan pemula untuk berpartisipasi. (2) Rasio peserta magang terhadap mentor yang ideal adalah 1:1; (3) Kurikulum yang berbasis budaya dan tidak terlalu luas akan berperan dalam kesuksesan program magang; (4) magang adalah belajar bekerja yang sebenarnya; (5) kegiatan magang berjalan sejalan dan berdampingan kegiatan industri, sehingga saatnya peserta magang selesai, dapat langsung masuk mengikuti alur ditempat kerja; (6) milestone sebagai tonggak tahapan yang harus dilalui agar tercapai kesuksesan dalam bekerja; (7) umpanbalik terhadap milestone.

Umpan balik tiap tahapan terhadap *milesote* nya penting untuk mengetahui apakah program magang ini berjalan lancar, seperti a) apakah pekerjaan berjalan dengan baik, (b) apakah pekerjaan berjalan tidak baik; (c) bagaimana pengembangannya/ eksplorasinya dan (d) poin-poin tindakan yang harus diambil.

Keunggulan dan keterbatasan program *student exchange/* magang dapat diatasi dengan persiapan yang baik. *Generally, modern "Quality Apprenticeships" will comply with all of the following characteristics:* (a) *A contractual agreement* atau kesepakatan antara magang dan perusahaan pelatihan, yang jelas menetapkan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Magang ini memiliki durasi tetap, diatur oleh hukum atau kontrak pelatihan;(b)Bagian terbesar dari pelatihan berlangsung di perusahaan. Biasanya magang yang dianggap sebagai "karyawan" dengan hak untuk berpartisipasi secara teratur dalam pelatihan. Pekerja itu juga menerima gaji atau tunjangan; (c) Pekerja itu berhak untuk pelatihan berbasis sekolah pelengkap reguler mengikuti program pelatihan keseluruhan dikoordinasikan dengan perusahaan pelatihan; (d) Pelatihan dan

kondisi kerja di perusahaan menghormati undang-undang ketenagakerjaan nasional, khususnya kode kerja muda. Seperti rekan kerja di perusahaan, magang berhak untuk perlindungan sosial seperti asuransi kesehatan dan kecelakaan. standar keselamatan dan kesehatan secara ketat diamati; (e) Setelah berhasil, magang menerima sertifikat nasional yang sah dan resmi diakui; (f) Pelatihan berbasis perusahaan mengikuti program pelatihan terstruktur untuk belajar perdagangan penuh /pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditentukan (Alessandra Molz, 2015).

Tahapan program magang ini berbeda dari satu negara dengan negara lain, termasuk keterlibatan pemerintahnya. Elemen kunci kualitas sistem magang secara modern, didasarkan pada asas kompleksitas lingkungan. Magang luar negeri atau "*exporting*" *apprenticeship* dihadapkan problematika, namun skema magang kurang lebihnya sama. Identifikasi suksesnya magang modern pada prinsipnya tergantung pada: (a) Dialog sosial: Dialog sosial mengacu pada semua bentuk negosiasi dan konsultasi antara pemerintah, asosiasi pengusaha dan serikat pekerja organisasi (serikat pekerja) dari masalah ketenagakerjaan. Dalam berkinerja baik sistem magang, dialog sosial biasanya kuat dan mitra sosial memainkan peran penting dalam pemerintahan magang, monitoring keuangan, menilai keterampilan perlu, pengaturan standar, pemantauan kondisi kerja dan pemeriksaan (b) Peran dan tanggung jawab: Magang tergantung pada peran dan tanggung jawab antara mitra sosial dan otoritas pemerintah di tingkat makro dan perusahaan, sekolah pelatihan dan magang di tingkat mikro. Pada tingkat meso, ada kebutuhan untuk dukungan kelembagaan dan fasilitasi antara para pemangku kepentingan untuk operasi praktis dari skema magang. Dukungan tersebut dapat diberikan oleh kamar dagang, jasa tenaga kerja atau lembaga lainnya: (1). Pembiayaan: Sebuah pembiayaan suara yang mencakup mekanisme co-dana antara pemerintah dan perusahaan sangat penting untuk keberhasilan magang. Pembiayaan perlu memberikan insentif yang tepat bagi semua pemangku kepentingan, sekaligus menjaga biaya pada tingkat yang wajar. Terutama perusahaan perlu diyakinkan bahwa investasi mereka dalam magang akan membayar kembali. (2) Legislasi: magang modern dan formal biasanya diatur oleh: a) hukum yang mendefinisikan peran dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan dan prosedur untuk keterampilan standar, kurikulum dan ujian; b) kontrak magang yang menetapkan hak dan kewajiban dari perusahaan dan magang; c) UU ketenagakerjaan nasional dengan ketentuan tentang

perlindungan ketenagakerjaan muda untuk mengatur kondisi kerja magang. Legislasi harus koheren, sederhana dan efektif dan menyesuaikan diri dengan yang ada kelembagaan set-up nasional. Over-peraturan harus dihindari dan tidak berarti harus undang-undang akan tersusul dari negara lain (Alessandra Molz 2015).

Bagaimana dengan program magang atau *student exchange* di Indonesia. Secara hukum sudah dipayungi melalui SK bersama antara menteri Pendidikan, menteri Perindustrian dan menteri Ketenagakerjaan. Sayangnya, SK bersama tiga kementerian tersebut, yang semestinya dapat menjadi dasar dan payung yang kuat untuk pengembangan program *apprenticeships* ini, masih menggantung tanpa tindak lanjut.

Fakta menunjukkan, cukup banyak institusi pendidikan yang melaksanakan program ini, melalui kerjasama luar negeri mereka, dengan prosedur legal yang disesuaikan dengan kondisi institusi masing-masing. Bagaimana *bargaining position* calon lulusan dari lembaga pendidikan khususnya pendidikan vokasional? Berdasarkan wawancara dengan pihak pengembang program *student exchange* luar negeri, khususnya Malaysia, yang telah menanggapi pengiriman siswa dan mahasiswa magang luar negeri, diperoleh gambaran umum bahwa mereka dapat menyesuaikan diri, baik hard skill serta soft skill di dunia kerja para mahasiswa dan siswa ini ditempatkan. Artinya, mahasiswa Indonesia sebagai sumber daya manusia memiliki kekuatan *bargaining (nilai tawar)* di dunia kerja. Banyak peluang dapat melaksanakan "*expor*"*tapprenticeships* ini. Diberlakukannya bebas Visa diberbagai negara, khususnya Asean, merupakan peluang untuk melakukan penjajagan kerjasama *student exchange*.

Ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan yaitu; (a) mendapatkan industri yang memiliki visi dan tujuan yang sama, artinya adalah memilih industri yang relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan sesuai kurikulum lembaga pendidikan, dan memiliki *concern* atau kepedulian dangin memajukan dunia pendidikan sebagai produsen tenaga kerja. (b) Kepemimpinan yang kuat dalam menyusun strategi untuk melaksanakan visi dan misi program *student exchange*. (c) Berpikir kreatif dan inovatif dalam keuangan dan penggalangan dana sebagai motor penggerak pelaksanaan program; (d) hitam diatas putih tujuan magang, harapan dan komitmennya serta dipayungi dasar hukum yang jelas dan tidak merugikan berbagai pihak; (e) monitoring dan terjalin komunikasi, dan dapat dilaksanakan melalui media komunikasi yang relatif murah, seperti video

conference, Skyp, Whats Up, email dan media lain, karena kontrak tidak menjamin keterlaksanaan program yang baik; (f) buatlah komitmen kerjasama jangka panjang, karena lebih menguntungkan, tidak terlalu sering berganti partner lembaga, dapat melakukan evaluasi dan dampak program yang dibuat; dan (g) sabar, karena keterampilan tidak akan terjadi dalam semalam.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Program magang atau *student exchange* akan bermakna dan berdampak positif ketika adanya lembaga formal semacam *Registered Training Organisation*, yang secara serius dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan program.

Saran untuk terlaksananya program ini adalah: perlu dukungan pemerintah Indonesia untuk mengaktifkan SK bersama 3 Kementrian, yaitu Kementrian Pendidikan, kementrian Industri dan kementrian Ketenaga Kerjaan terkait magang industri. Dibentuknya forum kerjasama magang luar negeri disemua perguruan tinggi vokasional sejenis se Indonesia, dengan target 7 tahap: dapatkan industri yang memiliki visi dan tujuan yang sama; kepemimpinan; kreatif dalam keuangan dan penggalangan dana; hitam diatas putih tujuan magang, harapan dan komitmennya; monitoring dan terjalin komunikasi, karena kontrak tidak menjamin keterlaksanaan program yang baik; buatlah komitmen kerjasama jangka panjang; dan sabar, "keterampilan tidak akan terjadi semalam".

## REFERENSI

- Alessandra Molz. (2015). *BackgroundNote-VC-Apprenticeship-Molz.pdf*. Retrieved from <http://en.unesco.org/events/virtual-conference-delivering-tvet-through-quality-apprenticeships>
- Besty Charmin. (2014). Luar Negeri - 1200 Siswa SMK di Indonesia Melakukan Prakerin di Malaysia | RRI Portal Berita Radio Berjaringan Nasional dan Internasional. Retrieved January 6, 2016, from [http://rri.co.id/post/berita/84793/luar\\_negeri/1200\\_siswa\\_smk\\_di\\_indonesia\\_melakukan\\_prakerin\\_di\\_malaysia.html](http://rri.co.id/post/berita/84793/luar_negeri/1200_siswa_smk_di_indonesia_melakukan_prakerin_di_malaysia.html)
- Cathy Hsu C.H, (), *Global Tourism Higher Education: Past, Present, and Future, Journal of Teaching in Travel and Tourism, Volume 5, Numbers 1/2/3 2005.*
- Cristina Grasseni (2007), *Skill Vision: Between Apprenticeship and Standards*, : Berghahn Books

- Cunningham, I., Dawes, G., & Bennett, B. (2004). *The handbook of work based learning /: Ian Cunningham, Graham Dawes, and Ben Bennett*. Aldershot, Hants, England; Burlington, VT: Gower.
- David H. Hoover1. (2012). Apprenticeship-Programs.pdf, app. Education and Communities, (2014), *A Guide To Apprenticeship and Traineeships in New South Wales*, New South Wales: NSW Department of Education and Communities. Published by State Training Services
- Gasskov, V. (2000). *Managing vocational training systems: a handbook for senior administrators*. Geneva: ILO.
- Harrity, E. P., Fulbright New Zealand, & Ian Axford New Zealand Fellowship in Public Policy. (2013). *Vocational pathways: using industry partnerships and personalised learning to improve student outcomes*.
- Kathy Baron. (2015, DESEMBER). Seven Steps to Building School-to-Industry Partnerships | Edutopia. Retrieved December 23, 2015, from <http://www.edutopia.org/stw-career-technical-education-community-partnerships>
- Michael J Farr, Laurence Shatkin, (2005), *250 Best Jobs Through Apprenticeship*,
- Watters, J. J., Hay, S., Dempster, N., & Pillay, H. (2013). School industry partnerships: An innovative strategy for vocational education. In *Proceedings of the ECER VETNET Conference 2013*. WIFO. Retrieved from <http://eprints.qut.edu.au/63684/>
- <http://edukasi.kompas.com/read/2016/04/23/17424071/Kenapa.Lulusan.Perguruan.Tinggi.Makin.Susah.Mendapat.Pekerjan>